



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 6769-6788

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Bagan Serdang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Pantai Labu

Muhaimin Aziz^{1✉}, Muhammad Arifin Nasution²

Prodi Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara

Email: muhaiminaziz112@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Banjir rob merupakan permasalahan utama yang selalu terjadi di daerah pesisir pantai seperti Desa Bagan Serdang. Namun keadaan dilapangan, implementasi pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob masih berjalan lambat dan belum maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa proses pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang masih berjalan lambat dan belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih ditemui masalah dalam proses implementasi pembangunannya seperti sumber daya manusia Pemerintah Desa yang tidak sesuai antara pendidikan terakhirnya dengan profesi saat ini, derajat pencapaian yang belum maksimal, pembangunan yang lambat, pedoman pelaksanaan yang tidak terstruktur, dan manfaat dari pembangunan infrastruktur desa seperti drainase dan TPT masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Maka dari itu, seharusnya pihak Pemerintah Desa bisa memperbaiki kinerja mereka untuk lebih cepat dan tepat dalam proses pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob ini dan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Implementasi, Pembangunan Infrastruktur Desa, Penanggulangan Bencana*

Abstract

Rob floods are a major issue that consistently occurs in coastal areas like Bagan Serdang Village. However, in the field, the implementation of village infrastructure development as a mitigation measure for rob flood disasters is still progressing slowly and has not yet reached its maximum potential. The method used in this research is descriptive research with a qualitative approach. Data collection is conducted through observation, interviews, and documentation techniques. The results of the research indicate that the process of developing village infrastructure as a mitigation measure for rob flood disasters in Bagan Serdang Village is still progressing slowly and has not yet reached its maximum potential. This is because there are still problems encountered in the implementation process of its construction, such as mismatched human resources in the Village Government in terms of their education and current profession, suboptimal achievement levels, slow construction progress, unstructured implementation guidelines, and the benefits of village infrastructure development such as drainage and retaining walls are still not fully felt by the community. Therefore, the Village Government should improve their performance to expedite and ensure accuracy in the process of developing village infrastructure to mitigate rob flood disasters. This way, the benefits can be promptly felt by the community.

Keyword: *Implementation, Village Infrastructure Development, Disaster Mitigation*

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan salah satu permasalahan umum yang ada di Indonesia. Menurut *United Nations International Strategy for Disaster Reduction* (UNSDR) pada tahun 2009, menjelaskan bahwa bencana alam ini merupakan suatu konsekuensi serangan berbagai gejala alam (geologi, hidrologi, meteorologi, dan oseanografi) yang dapat menyebabkan kerugian dalam hal kehilangan jiwa, cedera, kerusakan properti, gangguan sosial dan ekonomi atau dampak negatif pada lingkungan alam. Kebanyakan bencana alam terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti faktor geologi, hidrologi, meteorologi, oseanografi dan faktor ulah tangan manusia sehingga memicu terjadinya bencana alam.

Permasalahan bencana alam banyak terjadi di daerah-daerah kecil di Indonesia, salah satunya yaitu Desa Bagan Serdang yang berada di Kecamatan Pantai Labu. Desa Bagan Serdang merupakan salah satu dari 19 desa di wilayah Kecamatan Pantai Labu Kabupaten Deli Serdang, yang terletak 3,7 Km dari kantor kecamatan. Desa Bagan Serdang merupakan daerah yang berada di garis pinggiran pantai, sehingga Desa ini sangat rentan terjadi bencana alam. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Desa Bagan Serdang seperti banjir rob, hujan badai, dan angin puting beliung. Permasalahan banjir rob merupakan masalah utama yang kerap sekali terjadi di daerah pesisir pantai.

Banjir rob merupakan peristiwa alam yang seringkali terjadi di daerah pesisir pantai yang memiliki tinggi permukaan tanah yang tidak melebihi pasang air laut yang paling

tinggi, Bakti (2010). Akibatnya ketika pasang air laut tiba, sebagian wilayah dapat terendam oleh air banjir. Banjir rob terutama disebabkan oleh perubahan pasang surut air laut. Tinggi banjir rob sama dengan tinggi pasang air laut, dan banjir ini akan surut ketika air laut surut. Tinggi banjir rob dapat bervariasi seiring dengan perubahan pasang surut air laut yang terjadi. Tinggi permukaan air laut ini bisa digunakan untuk memperkirakan luas daerah yang akan tergenang oleh banjir rob pada waktu tertentu (Bakti, 2010 dalam Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022).

Permasalahan banjir rob di Desa Bagan Serdang ini mulai mencuat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Desa Bagan Serdang rentan terhadap masalah fenomena alam seperti banjir dikarenakan wilayahnya yang berada di pesisir pantai. Sehingga Desa ini dirasa kurang aman diakibatkan oleh bencana banjir yang bisa kapan saja terjadi. Selain itu, dampak yang diberikan atas kejadian banjir rob membuat banyak kerusakan yang merugikan masyarakat sekitar seperti kerusakan pada rumah warga, akses jalan, merusak sarana maupun prasarana publik, serta akan menimbulkan dampak negatif pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Maka dari itu, permasalahan bencana banjir rob ini menjadi permasalahan serius di Desa Bagan Serdang yang harus segera diatasi.

Tabel 1. Kejadian Bencana Banjir Rob Desa Bagan Serdang 2017-2022

Keterangan	Tahun					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah kejadian banjir rob	4	5	4	6	8	11

Sumber : Observasi Peneliti, 2024

Melalui tabel 1 diatas dapat dilihat jumlah kejadian bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Maka dari itu, permasalahan banjir rob ini menjadi permasalahan utama yang harus segera diatasi. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan untuk menekan serta menanggulangi bencana banjir rob yang kerap terjadi ini yaitu dengan membangun infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir untuk menekan tingkat terjadinya banjir. Sebagaimana menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa ini tentunya menjadi bagian dari strategi penanggulangan banjir rob yang sangat dibutuhkan.

Desa Bagan Serdang telah melaksanakan pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob di desa mereka. Hal tersebut tentunya telah dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat dan kemudian diputuskan dengan kesepakatan bersama. Prioritas pembangunan infrastruktur desa ini sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 80 ayat 4 dijelaskan bahwa terdapat kegiatan pembangunan desa yang diprioritaskan salah satunya

yaitu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia. Pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang direncanakan oleh pihak Desa Bagan Serdang yaitu pembangunan drainase dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) yang sudah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2022-2028. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pasal 115 bahwa perencanaan pembangunan desa yang telah dimusyawarahkan disusun kedalam RPJM Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang ini telah dibuat sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur untuk menekan tingkat bencana serta penyusunan RPJM Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Melalui peraturan ini, pemerintahan Desa Bagan Serdang membuat susunan RPJM Desa Bagan Serdang yang didalamnya memuat kegiatan/program pembangunan infrastruktur desa untuk menekan tingkat bencana banjir rob menggunakan dana desa. Anggaran dana desa yang masuk ini berasal dari APBN yang kemudian di transfer ke Rekening Kas Desa sebagai penyimpanan sementara dan kemudian akan bisa digunakan dengan waktu tertentu. Maka dari itu, pelaksanaan kegiatan maupun program yang ada di RPJM Desa ini dilaksanakan secara mandiri oleh Desa Bagan Serdang, terutama pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob tersebut.

Implementasi pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan bencana banjir rob seperti pembangunan drainase dan pembangunan tembok penahan tanah (TPT) memiliki dana sekitar Rp. 7.800.000.000 dari total dana RPJM Desa 2022-2028 sekitar Rp. 30.981.400.000. Dana untuk pembangunan infrastruktur desa baik pembangunan drainase dan pembangunan TPT tersebut untuk selama 6 tahun dengan target masing-masing pembangunan yaitu 6000 meter. Namun kenyataan yang terjadi di Desa Bagan Serdang pada pengimplementasian pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir rob ini masih belum maksimal dan lambat. Hal tersebut dapat dilihat pada infrastruktur penanggulangan bencana banjir rob yang masih bermasalah, seperti saluran drainase atau parit yang kecil dan tidak dinormalisasi, pembangunan TPT yang belum maksimal, dan lain

sebagainya. Permasalahan tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.3 berikut untuk melihat pemetakan permasalahannya:

Tabel 2. Masalah Infrastruktur Fisik Desa Bagan Serdang

No	Gambaran
1	Pembangunan Tembok Penahan Tanah belum maksimal
2	Pembangunan saluran drainase belum maksimal
3	Kondisi parit tidak efisien dan belum merata
4	Saluran drainase/parit kurang dirawat dan dinormalisasi

Sumber : RPJMDes Bagan Serdang, 2023

Berdasarkan pada tabel 2 dapat dilihat permasalahan yang ada pada Desa Bagan Serdang. Walaupun pembangunan infrastruktur ini telah masuk ke RPJM Desa dan harus dibangun secara optimal, namun kenyataan dilapangan pembangunan infrastruktur tersebut belum berjalan maksimal. Masih banyak masyarakat yang memperlakukan pembangunan infrastruktur tersebut yang belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat desa. Dikarenakan proses pembangunan infrastruktur ini belum merata membuat banjir rob masih terus terjadi dan merugikan masyarakat.

Dengan masih terjadinya bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ini belum cukup baik. Sehingga pemerintah desa harus bisa membuat strategi dan menganalisis lebih jauh mengapa pembangunan infrastruktur yang mereka laksanakan belum bisa memberikan manfaat yang semestinya. Jika diteliti lebih jauh, pembangunan TPT ini tidak hanya dilakukan oleh Desa Bagan Serdang saja. Terdapat beberapa daerah yang telah melakukan pembangunan TPT untuk mencegah terjadinya banjir di daerah mereka. Berikut terdapat pemaparan beberapa daerah yang melakukan pembangunan TPT seperti Desa Bagan Serdang sebagai berikut :

Tabel 3. Pembangunan Tembok Penahan Tanah di Daerah Lain

No	Daerah	Penjelasan	Tingkat Keberhasilan
1	Kelurahan Rembang Selatan- Jakarta Barat	Pembangunan TPT di kali Pesanggrahan setinggi 2 m.	60%
2	Desa Kedawang Kulon- Pasuruan	Pembangunan TPT DI Sungai Rejoso setinggi 4 m untuk mencegah luapan air.	70%
3	Desa Leuwi – Kabupaten Lebak	Pembangunan TPT dengan dana 522 juta pada anggaran 2020 setinggi 5 m dengan panjang 1,4	75%

		Km	
4	Desa Muara Dua – Kabupaten Lebak	Pembangunan TPT dengan dana 863 juta pada anggaran 2020 setinggi 5 m dengan panjang 1,9 Km	70%

Sumber : Observasi Peneliti, 2024

Pada Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa daerah yang juga melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk mencegah terjadinya bencana banjir rob yaitu pembangunan TPT. Namun perbedaan yang dapat dilihat antara pembangunan TPT dengan beberapa daerah tersebut dengan Desa Bagan Serdang adalah tingkat keberhasilannya. Tingkat keberhasilan didaerah tersebut mencapai 60% keatas. Sedangkan untuk tingkat keberhasilan pembangunan TPT Desa Bagan Serdang sendiri baru mencapai 20% yang mana masih sangat jauh perbandingannya. Tentu melihat fenomena ini menjadi pertanyaan publik mengapa implementasi pembangunan infrastruktur di Desa Bagan Serdang belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta tingkat keberhasilan yang masih rendah. Maka dari itu, menurut peneliti hal ini menjadi sangat penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Untuk lebih memahami kajian yang akan diteliti, maka penulis memerlukan adanya referensi yang didapat dari berbagai penelitian terdahulu untuk memperkaya ilmu pengetahuan peneliti, sehingga akan menghasilkan sebuah penelitian yang lebih baik guna melengkapi kekurangan dari peneliti yang terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti guna memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Peneliti menggunakan tiga penelitian terdahulu sebagai referensi ilmiah terhadap pokok permasalahan, sehingga peneliti dapat mendeskripsikan hal-hal yang membedakan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang pertama, dilakukan oleh Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019) Hasil penelitian ini melalui model Donald Van Metter dan Carl Van Horn implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan dikecamatan Tabir Selatan telah sukses dilakukan. Pembangunan jalan sejauh 9,3 Km yang menghubungkan desa Muara Delang-Gading Jaya hampir selesai. Alangkah baiknya jika pembangunan tersebut terus dilanjutkan hingga menuju perkotaan.

Penelitian terdahulu yang kedua, yang dilakukan oleh Susanti, I., Aminudin, A., & Suharto, S. (2021) meneliti tentang Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu. Hasil penelitian yaitu pihak Dinas PUPR Kota Bengkulu menyatakan

bahwa misi walikota periode 2013-2018 telah over target bahkan mencapai 1800 jalan mulus namun 1000 jalan mulus bukanlah merupakan program tetapi slogan yang di sampaikan ke masyarakat agar lebih familiar saja. Hal ini menjawab pertanyaan pada proposal penelitian. Artinya tidak penting jumlahnya lebih dari 1000 seperti pengakuan dari Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu namun lebih kepada temuan di lapangan yang masih memerlukan perhatian pemerintah terkait harapan masyarakat dan beberapa titik jalan yang tidak tersentuh padahal lebih krusial daripada jalan lain.

Kemudian penelitian terdahulu yang ketiga, dilakukan oleh Sasmito, C. (2019) meneliti tentang Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pembangunan infrastruktur jalan desa masih diperlukan pengembangan atau pembangunan berkelanjutan, beberapa tahapan pembangunan yaitu: komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat, adanya dukungan finansial dan sumber daya implementator sudah sesuai.

Pembaharuan yang membedakan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya dilihat dari permasalahan yang terjadi di lapangan, dimana lokasi yang peneliti pilih dalam penelitian saat ini belum pernah diteliti oleh penelitian sebelumnya. Hal lain yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian saat ini fokus pada implementasi pembangunan infrastruktur desa di Desa Bagan Serdang. Dimana penelitian terkait implementasi pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir rob belum pernah dilakukan di daerah manapun, khususnya di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh terkait implementasi pembangunan infrastruktur terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana banjir rob. Melalui latar belakang tersebut muncullah penelitian yang berjudul "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Bagan Serdang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob di Kecamatan Pantai Labu".

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah serangkaian tindakan yang melibatkan pengumpulan data, analisis, dan memberikan interpretasi yang relevan dengan tujuan penelitian, Creswell (2014). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bagan Serdang, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Teknik pengumpulan data dan sumber data ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan diperlukan untuk menganalisis objek penelitian (Sugiyono, 2016). Adapun teknik-teknik pengumpulan data dan sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Kemudian, metode yang digunakan untuk menentukan informan adalah *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, sebab data yang terkumpul bersifat kualitatif, berbentuk fenomena, dan memerlukan analisis mendalam untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah-langkah analisis data kualitatif, yang dijelaskan oleh Miles dan Haberman (dalam Sugiyono, 2021: 322-325), harus diikuti dalam proses analisis ini, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data dilakukan melalui penggunaan pendekatan triangulasi untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan adalah data yang dapat diandalkan untuk keperluan penelitian. Bentuk triangulasi yang digunakan diantaranya adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Bagan Serdang Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Rob Di Kecamatan Pantai Labu

Grindle (Mulyadi, 2015) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Dalam proses implementasi ini tentunya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk mencapai perubahan-perubahan yang telah digariskan atau telah ditentukan. Secara sederhana implementasi ini dapat diartikan sebagai pelaksanaan maupun penerapan dari perencanaan maupun kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya. Salah satu hal yang penting dalam implementasi adalah infrastruktur. Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Implementasi infrastruktur tersebut sama pentingnya dengan keberadaan infrastruktur yang ada di desa, khususnya Desa Bagan Serdang. Namun di Desa Bagan Serdang sendiri masih terlihat pelaksanaan pembangunan infrastrukturnya belum maksimal. Selain itu masih terdapat beberapa daerah yang belum memiliki infrastruktur sebagai penanggulangan banjir yaitu bangunan drainase.

Tabel 4. Rekapitulasi Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Desa

No	Permasalahan
1	Pembangunan drainase belum merata dengan jumlah 4 titik. Pada Dusun I ada 2 titik, Dusun II berjumlah 1 titik dan Dusun III berjumlah 1 titik.
2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah masih lambat dan baru terealisasi sepanjang 293,5 m saja selama 2 tahun
3	Kurangnya perawatan dan pemeliharaan atas bangunan drainase yang sudah di bangun.

Sumber : Observasi Peneliti, 2024

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan serta analisis data secara mendalam yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam baik secara langsung maupun tidak langsung di lapangan. Wawancara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi beserta data yang diharapkan, tentunya berfokus pada indikator dari Merille S. Grindle. Selanjutnya penjelasan dari fokus penelitian yang dilakukan dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Isi Kebijakan (*Content Of Policy*), terdapat 3 indikator yaitu

a. Manfaat yang Bisa diperoleh dari Pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Banjir

Dalam pengimplementasian pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan banjir rob yang dilaksanakan oleh Desa Bagan Serdang ini dilaksanakan sesuai dengan kepentingan publik atau kepentingan masyarakat setempat. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bagan Serdang bahwa kepentingan masyarakat menjadi dasar penting dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan ataupun penekanan tingkat terjadinya banjir rob. Perumusan RPJM desa ini dilakukan dengan memikirkan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat Desa sebagai target sasaran dari perencanaan dan pelaksanaan kebijakan agar manfaat yang dihasilkan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Alur penyusunan dan penetapan RPJM Desa ini telah diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. RPJM Desa Bagan Serdang sendiri telah dirancang berdasarkan Peraturan Desa Bagan Serdang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang RPJM Desa. Dengan dilaksanakannya RPJM Desa Bagan Serdang 2022-2028 diharapkan dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat desa, terutama pada kegiatan pembangunan infrastruktur untuk menekan tingkat terjadinya bencana banjir rob.

Kegiatan pembangunan infrastruktur desa ini merupakan salah satu program dari rancangan RPJM Desa Bagan Serdang, yang tentunya memiliki beberapa manfaat dalam pengimplementasiannya yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik. Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan banjir yaitu seperti drainase/parit, tanggul, dan tembok penahan tanah (TPT) guna untuk menekan tingkat terjadinya banjir rob. Sebagaimana hasil wawancara diperoleh bahwa infrastruktur desa yang dibangun sebagai pengendalian banjir ini dilaksanakan dengan baik sehingga mandaat yang telah direncanakan dapat terealisasi. Pelaksanaan infrastruktur desa ini dilakukan berdasarkan kepentingan masyarakat yang mana sebelum dilaksanakan pasti dirembukkan atau dimusyawarahkan terlebih dahuludengan masyarakat Desa Bagan Serdang. Maka manfaat dari pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir ini tentunya juga telah dipikirkan dan direncanakan dengan baik untuk masyarakat. Sebagaimana observasi yang peneliti lakukan untuk meninjau apakah masyarakat telah merasakan manfaat dari infrastruktur penanggulangan banjir dengan mewawancarai masyarakat.

Dari pernyataan yang diberikan oleh masyarakat mengenai manfaat yang diberikan dari adanya pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir tentunya telah dirasakan oleh masyarakat. Namun dari observasi yang peneliti lakukan, beberapa masyarakat juga masih mengeluhkan bahwa manfaat pencegahan banjir ini masih belum maksimal atau belum mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir di Desa Bagan Serdang masih lambat.

b. Derajat perubahan yang ingin dicapai

Dalam sebuah program maupun kegiatan yang akan dilaksanakan pastinya memiliki target pencapaian dan perubahan seperti apa yang diharapkan. Target perubahan yang ingin dicapai menjadi hal yang sangat penting untuk ditinjau. Perubahan tentunya ditunjukkan dengan adanya perkembangan dari kondisi sebelumnya ke kondisi yang lebih baik lagi sesudah adanya tindakan lebih lanjut. Hal ini akan membuktikan sejauh mana program ataupun kebijakan berjalan dengan melihat skala perubahan yang terjadi setelah diimplementasikan program maupun kebijakan tersebut. Sebagaimana dengan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dalam penanggulangan banjir yang dilaksanakan di Desa Bagan

Serdang.

Kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir ini tentunya dilaksanakan berdasarkan kepentingan dan aspirasi dari masyarakat sebagai target kegiatan. Dalam melihat derajat pencapaian perubahan yang baik dan benar dalam pembangunan infrastruktur desa dibutuhkan beberapa poin untuk menilai derajat pencapaian tersebut. Berdasarkan pada kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terdapat beberapa poin yang bisa diambil dan dijadikan sebagai penilaian derajat pencapaian yang baik dan benar dalam pembangunan infrastruktur desa diantaranya yaitu Partisipasi masyarakat, Perencanaan yang terstruktur, Implementasi yang efektif, Pembangunan yang berkelanjutan, dan Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan poin-poin tersebut, tentunya pihak Pemerintah Desa akan melaksanakan pembangunan infrastruktur desa ini dengan baik dan benar.

Permasalahan yang dihadapi oleh Desa Bagan Serdang salah satunya yaitu permasalahan banjir rob yang tidak menentu datangnya sehingga membuat masyarakat resah, sehingga permasalahan banjir rob ini memerlukan proses ataupun tindakan lebih lanjut untuk menekan tingkat lajunya kejadian banjir rob.



Gambar 1. Kejadian Banjir Rob

Sumber: Observasi Peneliti, 2024

Banjir pasang air laut atau banjir rob ini termasuk kedalam bencana banjir yang disebabkan oleh masuknya air laut ke daratan sebagai akibat dari pasangannya air laut yang tinggi (Marfai, 2004). Permasalahan banjir rob di desa Bagan Serdang sudah lama menjadi topik permasalahan masyarakat. Masyarakat banyak yang merasa dirugikan dengan permasalahan banjir rob yang sewaktu-waktu bisa datang dan mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selain itu, yang menjadi permasalahan bukan hanya pada saat banjir rob terjadi. Namun setelah banjir rob surut, masih terdapat dampak dari banjir rob tersebut yang membuat masyarakat resah. Mulai dari pemukiman yang menjadi semakin kumuh, harta benda yang rusak karena

tenggelam oleh air, kondisi jalan rusak, sarana dan prasarana publik juga rusak dan lain sebagainya. Maka dari itu, permasalahan banjir rob ini harus diselesaikan dengan serius dan terstruktur untuk mendapatkan perubahan yang maksimal.



Gambar 2. Kondisi Setelah Banjir Rob

Sumber : Observasi Peneliti, 2024

Melihat permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat, pihak desa sudah berupaya mendiskusikan solusi atau alternatif untuk menekan masuknya air pasang ke pemukiman masyarakat. Salah satu solusi yang dilakukan oleh pihak desa yaitu dengan membangun infrastruktur drainase dan tembok penahan tanah (TPT). Kegiatan pembangunan infrastruktur desa ini baik pembangunan drainase maupun tembok penahan tanah, sebelum diimplementasikan tentunya telah dipikirkan dan direncanakan dengan matang.

Solusi ataupun kegiatan yang telah direncanakan dan dirundingkan dengan masyarakat tersebut kemudian diusulkan kedalam RPJM Desa. Perencanaan yang masuk kedalam RPJM Desa nantinya akan dilaksanakan sesuai dengan keprioritasannya dan ditinjau pelaksanaannya. Sebagaimana dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan dapat membantu menekan tingkat masuknya air banjir rob ke permukiman masyarakat.

Tabel 5. Program/Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa Penanggulangan Banjir Rob

No	Kegiatan/Program	Mendukung SDGS ke	Jumlah Luas (meter)	Total Pagu Dana (Rp)
1	Pembangunan drainase	6,9	6000 m	1.800.000.000
2	Pembangunan tembok penahan tanah	9	6000 m	6.000.000.000

Sumber : Pemerintahan Desa Bagan Serdang, 2024

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa pemerintah desa Bagan Serdang sudah serius untuk menekan dan menanggulangi bencana banjir rob. Sebagaimana dapat dilihat kegiatan pembangunan infrastruktur penanggulangan banjir rob yang sudah direncanakan sedemikian rupa. Dalam meninjau pembangunan infrastruktur untuk menekan tingkat bencana banjir rob ini, kita perlu melihat rekapitulasi infrastruktur yang telah dibangun untuk melihat sejauh mana perubahan yang terjadi.

Tabel 6. Rekapitulasi Pembangunan Infrastruktur Desa Penanggulangan Banjir Rob

No	Jenis Kegiatan	Terealisasi		Data dalam RPJM Desa	Jumlah Dana Di RPJM Desa
		2022	2023	2022-2028	2022-2028
1	Pembangunan Drainase/parit	138 m	140 m	6.000 m	1.800.000.000
No	Jenis Kegiatan	Terealisasi		Data dalam RPJM Desa	Jumlah Dana Di RPJM Desa
		2022	2023	2022-2028	2022-2028
2	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT)	150 m	143, 5 m	6.000 m	6.000.000.000
Total					7.800.000.000

Sumber : Observasi Peneliti, 2024

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur desa Bagan Serdang masih dikatakan lambat. Hal tersebut dapat dilihat melalui rekapitulasi bahwa dalam kurun waktu dua tahun pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan banjir rob hanya sedikit terealisasi. Pembangunan infrastruktur drainase hanya terealisasi 278 m saja, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur TPT hanya terealisasi sepanjang 293,5 m dari masing-masing data yang terencana yaitu 6.000 m. Selain itu terdapat beberapa data yang menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur baik pembangunan drainase dan pembangunan TPT lambat sebagai berikut.

Tabel 7. Laju Pembangunan Infrastruktur Drainase dan TPT 2017-2023

No	Kegiatan/ Program Pembangunan Infrastruktur	Terealisasi						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembangunan drainase	-	70 m	-	98,5 m	110 m	138 m	140 m
2	Pembangunan TPT	-	-	-	100 m	120 m	150 m	143,5 m

Sumber : Observasi Peneliti, 2024

Pada tabel 7 menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur desa tersebut masih berjalan lambat dan lama. Pada tahun 2019 perencanaan pembangunan drainase dan pembangunan TPT terhambat dan gagal dikarenakan dana yang dialokasikan ke penanggulangan bencana wabah Covid-19. Setelah itu, perencanaan pembangunan drainase dan TPT dijalankan kembali, namun tetap saja pembangunannya belum maksimal. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang belum memadai, strategi pembangunan belum optimal, dan lain sebagainya. Sehingga derajat perubahan dari adanya implementasi pembangunan infrastruktur desa untuk menekan tingkat bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang belum tercapai sepenuhnya.

c. Sumber-sumber daya yang digunakan

Dari observasi yang peneliti lakukan, dalam implementasi pembangunan infrastruktur desa di Bagan Serdang ini, sumber daya yang berpengaruh yaitu pihak Pemerintah Desa Bagan Serdang. Pemerintah Bagan Serdang mengelola sendiri infrastruktur desa mereka dimulai dari musyawarah, perencanaan, hingga ke pelaksanaan. Dengan kata lain Pemerintah Desa memiliki wewenang berskala desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dananya berasal dari Dana Desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa segala perencanaan yang menggunakan Dana Desa akan ditangani dan ditanggung jawab implementasinya oleh Pemerintah Desa.

Implementasi pembangunan infrastruktur desa untuk menanggulangi bencana banjir rob dilaksanakan oleh bidang khusus yaitu Kaur Pembangunan. Kepala Urusan (Kaur) Pembangunan ini memiliki tugas untuk membantu Kepala Desa mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas

pembantuan.

Selain Pemerintah Desa Bagan Serdang sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan implementasi pembangunan infrastruktur desa, terdapat pendamping tenaga ahli yang diutus oleh Kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pihak yang memonitoring kegiatan yang dilakukan pada setiap desa salah satunya yaitu Desa Bagan Serdang. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff dinas diketahui bahwa kinerja dari sumber daya manusianya yaitu Pemerintah Desa Bagan Serdang masih dikatakan belum mumpuni atau belum maksimal. Hal tersebut tentunya banyak faktor yang mempengaruhi mulai dari proses pengerjaan yang lambat serta sumber daya manusianya yang kurang profesional dan kurang ahli dalam bidang maupun divisi yang diduduki. Terutama dilihat dari jenjang pendidikan yang ditempuh dengan posisi jabatan yang diduduki kebanyakan belum sejalan dan setara dengan jobdesk maupun tupoksi yang ingin dicapai dalam divisi masing-masing. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan, Pemerintah Desa Bagan Serdang tetap aktif mengikuti pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang mereka miliki.

2. Lingkungan Kebijakan (*Context Of Policy*), terdapat 3 indikator yaitu

a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat

Berdasarkan hasil wawancara terkait strategi ini diperoleh bahwa terdapat strategi-strategi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa Bagan Serdang untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pernyataan wawancara tersebut dijelaskan bahwa strategi yang dibuat sesuai dengan manfaat-manfaat yang telah digariskan untuk dirasakan oleh masyarakat terutama terkait mencegahnya bencana banjir rob. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ini telah direncanakan dengan terstruktur dan tersistem tentunya agar mendapatkan hasil yang baik. Namun, dalam observasi yang peneliti lakukan, strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Bagan Serdang kurang terstruktur dan tersistem dengan rapi. Hal ini dikarenakan berdasarkan wawancara dengan pihak Pemerintah Desa tidak ditemukan poin-poin strategi yang memang telah direncanakan dengan terstruktur oleh mereka. Sebagaimana pendapat dari Grindle (dalam Agustino, 2012) yang menjelaskan bahwa strategi ini harus dilaksanakan dengan terstruktur dan cermat, apabila suatu kebijakan maupun program dijalankan tanpa adanya perhitungan yang teliti dan matang, maka sangat besar kemungkinan kebijakan maupun kegiatan yang akan diimplementasikan akan jauh dari hasil yang diharapkan. Maka dari itu, pembuatan strategi yang terstruktur

dan teliti ini sangat perlu untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur desa dengan matang demi mencapai hasil yang diinginkan dan dapat dirasakan dengan baik manfaatnya oleh masyarakat setempat.

b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa

Lembaga yang dimaksud disini ialah pihak Pemerintah Desa Bagan Serdang yang memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan maupun program-program yang telah direncanakan untuk memajukan dan mensejahterahkan masyarakat desa. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Bagan Serdang ialah implementasi pembangunan infrastruktur desa untuk menanggulangi bencana banjir rob. Disini akan dilihat seperti apa karakter perilaku maupun sikap yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa Bagan Serdang untuk mendukung keberhasilan dari implementasi pembangunan infrastruktur tersebut.

Dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur, perilaku serta sikap yang diberikan oleh pemerintah desa dalam proses pembangunan infrastruktur ini sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan yang berlangsung. Sebagaimana menurut pandangan dari Grindle (dalam Agustino, 2012) yang menjelaskan bahwa karakteristik dari lembaga dan rezim yang berkuasa ini dimaksudkan pada identik struktur birokrasi yang baik dan terstruktur. Karakteristik lembaga yang melaksanakan program ini biasanya mencakup tegasnya kepemimpinan, hal ini dimaksudkan dengan kepemimpinan yang tegas dan mengendalikan kepemimpinan yang erat dan kuat. Memiliki kontrol birokrasi yang baik, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan secara baik dan terorganisir. Beberapa karakteristik tersebut tentunya harus dimiliki oleh Pemerintah Desa Bagan Serdang sebagai pelaksana program ataupun kegiatan pembangunan infrastruktur desa agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan terstruktur, tersistem, dan baik.

Dalam observasi yang peneliti lakukan, diketahui bahwa karakter dari perilaku dan sikap yang diberikan oleh pelaksana program yaitu Pemerintah Desa untuk mempengaruhi keberhasilan pembangunan dikatakan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk respon yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa yang senantiasa membuka forum terbuka sebagai bentuk keterbukaan mereka dengan masyarakat melalui musyawarah desa. Selain itu pula, pihak Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan infrastruktur desa juga melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan aspirasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur desa.

c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana

Dalam melihat tingkat kepatuhan dan respon yang baik dari Pemerintah Desa Bagan Serdang, dapat dilihat dari tingkat keberhasilan implementasi pembangunan infrastruktur desa yang dilaksanakan. Apabila kebijakan yang dilaksanakan berhasil, tentunya dampak positif dan manfaat dari infrastruktur tersebut dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Namun sebaliknya, jika pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa ini tidak berjalan dengan baik, maka dampak positif dan manfaat yang telah diharapkan tidak bisa dirasakan oleh masyarakat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Bagan Serdang diketahui bahwa pihak pemerintah desa Bagan Serdang telah berupaya memberikan sikap terbuka dan menerima semua masukan dari masyarakat. Selain itu juga, sebagai bentuk respon dari permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat pihak pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dengan masyarakat untuk membahas dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang dirasakan. Dalam menilai suatu kinerja ataupun tingkat kepatuhan, keterbukaan dan respon dari organisasi pelaksana kegiatan yaitu pemerintah desa dalam implementasi pembangunan infrastruktur desa, ada baiknya melihat penilaian dari sudut pandang orang lain. Selain itu, dari pandangan Dinas Pemberdayaa Masyarakat dan Desa menyatakan bahwa pihak pemerintah desa Bagan Serdang masih lambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa. Hal ini dapat dilihat dari proses perencanaan sampai ke pelaksanaan yang berjalan lambat dan kurangnya sumber daya manusia profesional dalam menjalankan tugasnya dan sumber daya manusia yang kurang disiplin. Jika ditelusuri kembali, sumber daya manusia yang profesional dan disiplin ini mendukung keberhasilan implementasi pembangunan infrastruktur desa untuk menekan tingkat bencana banjir rob di Desa Bagan Serdang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan indikator dari Merille S. Grindle sebagai tolak ukur untuk melihat proses implementasi pembangunan infrastruktur desa dapat disimpulkan bahwa implementasi pembangunan infrastruktur desa di Bagan Serdang belum bisa dikatakan baik. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa temuan dilapangan yang belum sesuai dengan indikator Merille S. Grindle yang digunakan. Beberapa indikator yang belum sejalan dengan temuan dilapangan yang pertama itu ada pada infikator manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur desa yang menunjukkan bahwa manfaat yang seharusnya bisa dirasakan langsung dengan cepat dan

tepat, malah kurang dirasakan oleh masyarakat karena lambatnya proses pembangunan dan masih sedikit pembangunan yang dilaksanakan. Kedua terdapat pada indikator derajat perubahan yang ingin dicapai, menunjukkan bahwa pencapaian atas perubahan yang diinginkan masih belum terlihat signifikan dan berjalan lambat. Sebagaimana data yang ada menunjukkan selama kurun waktu dua tahun pembangunan drainase yang terealisasi hanya 278 m dan pembangunan TPT hanya 293,5 m saja.

Ketiga pada indikator sumber daya yang digunakan menunjukkan bahwa sumber daya pada Pemerintah Desa Bagan Serdang masih dikatakan belum profesional dan masih ada yang profesinya tidak sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Seharusnya untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang baik harus melibatkan sumber daya manusia yang profesional dan sesuai dengan ahlinya. Keempat yaitu ada pada indikator kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat menunjukkan bahwa langkah strategis dalam implementasi pembangunan infrastruktur desa ini belum terstruktur dan tersistem dengan rapi. Sebagaimana ditemukan bahwa tidak terdapat prosedur yang seharusnya dilakukan oleh para pelaksana untuk mencapai hasil pembangunan infrastruktur desa yang baik. Kemudian terakhir terdapat pada indikator tingkat kepatuhan dan adanya respon pelaksana program yang menunjukkan bahwa tingkat responsif dan kepatuhan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur desa masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari lambatnya proses pembangunan infrastruktur yang ada desa, padahal pembangunan infrastruktur desa sebagai penanggulangan banjir rob ini masuk kedalam skala infrastruktur prioritas. Maka dari itu, dapat disimpulkan implementasi pembangunan infrastruktur desa di Bagan Serdang belum berjalan dengan maksimal dikarenakan prosesnya masih berjalan lambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendi, Sofian dan Tukiran, (2012). *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Fahlevi, M. R. (2018). *Pemilihan Alternatif Konstruksi Tanggul Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Studi Kasus: Proyek Pengembangan Kawasan Tambaklorok Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Teknik UNISSULA).
- Fimansyah, D. (2015). *Pengaruh Strategi pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil belajar matematika*. *Judika (Jurnal Pendidikan UNSIKA)*, 3(1).

- Grigg, N. Fontane, G. (2000). *Infrastructure System Management & Optimization*, Internasional Seminar Paradigm & Strategy of Infrastructure Management. Civil Engineering Departement: Diponegoro University
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Hardani, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, E. F. (2020). *Metode penelitian kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hartini, S., & Kadarsih, S. (2012). Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Jalan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(2), 284-294.
- Ibrahim, A. H., & Supriatna, T. (2019). *Epistemologi Pemerintahan*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Kodoatie, R.J. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kollek, D. (2013). Hospital disaster readiness: why are we unprepared?. Research paper in Canadian Association of Emergency Physician Disaster Committee.
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 67-78.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mankiw, N. G. (2003). A brief history of macroeconomic thought and policy. *Journal of Economic Perspectives*, 17(3), 27-48.
- Marfai. (2004). Tidal flood hazard assessment: modeling in raster GIS, case in Western part of Semarang coastal area. *Indonesian Journal of Geography*.
- Mukhsin, D. (2015). Strategi Pengembangan Infrastuktur Kecamatan Caringin Sebagai Pkwp Wilayah Pusat Pertumbuhan Rancabuaya. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(1).
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Press.
- Nurmadimah, F. (2012). Analisis pemilihan proyek pengembangan bandara UPT dengan skema KPS. Universitas Indonesia.
- Rohmah, K. T. (2016). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Publika*, 4(7).
- Rustiadi, E. (2011). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Rakyat.

- Safkaur, T. L. (2014). Implementasi kebijakan publik: review teori. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(1), 23-31.
- Salim, M. A. (2018). Penanganan banjir dan rob di wilayah Pekalongan. *Jurnal Teknik Sipil*, 11, 15-23.
- Sasmito, C. (2019). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(3).
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2018). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryono, A. (2010). *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Syafitri, A. W., & Rochani, A. (2022). Analisis penyebab banjir rob di kawasan pesisir studi kasus: Jakarta Utara, Semarang Timur, Kabupaten Brebes, Pekalongan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 16-28.